

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pupuk bersubsidi di Indonesia mengalami beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain adalah kelangkaan pupuk bersubsidi, lambatnya pembagian pupuk susulan, pengurangan jatah pupuk bersubsidi, dan tidak adanya kesesuaian Harga Eceran Tinggi (HET). Masalah ini berdampak langsung pada kebutuhan petani dan keberlanjutan pengerjaan lahan pertanian. Selain itu, terdapat masalah dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, mulai dari proses penganggaran, pengadaan, distribusi, hingga penggunaan pupuk bersubsidi. Salah satu upaya pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi adalah melalui program kartu tani. Program kartu tani merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi. Program kartu tani sendiri diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016.

Program pupuk bersubsidi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan lainnya untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau. Pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Untuk tahun 2023, HET pupuk bersubsidi telah ditetapkan, di mana harga untuk pupuk urea adalah Rp 2.250 per kg, dan untuk pupuk

NPK adalah Rp 2.300 per kg. Harga pupuk non-subsidi di Klaten untuk pupuk urea adalah Rp 8.200 per kg, dan untuk pupuk NPK adalah Rp 12.500 per kg. Pupuk bersubsidi yang harganya lebih rendah dapat membantu petani kecil dan menengah untuk mendapatkan pupuk dengan lebih mudah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani di tingkat lokal dengan mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber daya pertanian. Pupuk bersubsidi sendiri dapat dibeli oleh petani di agen atau distributor pupuk bersubsidi. Petani mendapat bantuan pupuk bersubsidi sesuai dengan luas lahan (ha) yang digarap, semakin luas lahan pertanian yang digarap semakin banyak pupuk bersubsidi yang didapatkan. Pupuk subsidi diberikan kepada petani yang memiliki tanaman padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.

Berdasarkan Kementerian Pertanian, pada tahun 2023 pemerintah Indonesia menargetkan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 9,86 juta ton dengan anggaran sebesar Rp 25,9 triliun. Penyaluran pupuk bersubsidi ditargetkan untuk mencapai 90% dari total kebutuhan pupuk petani. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian melalui program subsidi pupuk. Program pupuk bersubsidi telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Dampak positif pupuk bersubsidi pada sektor pertanian mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, serta kontribusi terhadap pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Subsidi pupuk dinilai berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, khususnya tanaman. Selain itu, penggunaan pupuk bersubsidi juga terasa pada peningkatan produktivitas padi.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, produksi padi di kabupaten Klaten pada tahun 2022 mencapai 2,6 juta ton, meningkat 5,5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi padi ini didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah subsidi pupuk. Selain padi, produksi komoditas pertanian lainnya di Kabupaten Klaten juga meningkat pada tahun 2022. Produksi jagung meningkat 10%, produksi cabai rawit meningkat 15%, dan produksi bawang merah meningkat 20%.

Program kartu tani terkait pupuk bersubsidi telah diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Klaten. Pada pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Klaten memastikan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Program Kartu Tani sejak tahun 2017. Pelaksanaan program ini dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Klaten agar pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan efektif. Pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten merupakan komponen penting dalam proses budidaya tanaman yang menyumbang 20% terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Sayangnya, Kabupaten Klaten masih mengalami permasalahan kelangkaan pupuk terutama pada pupuk bersubsidi. Banyak petani di Kabupaten Klaten mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Permasalahannya rata-rata yaitu harga pupuk yang mahal dan ketersediaan pupuk yang terbatas menjadi persoalan yang dihadapi beberapa kelompok tani di Kabupaten Klaten. Selain itu, didapatkan juga petani yang sebagian besar memiliki latar

belakang pendidikan rendah dengan kemampuan mengaplikasikan teknologi yang terbatas di Kabupaten Klaten.

Tabel 1. Pengguna Kartu Tani di Kabupaten Klaten

Kecamatan	Jumlah Petani Pengguna Kartu Tani
Delanggu	15.460
Polanharjo	14.000
Ceper	12.500
Wedi	11.900
Tulung	10.800
Bayat	10.200
Juwiring	9.800
Jogonalan	9.600
Karangnongko	9.400

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Klaten, 2023.

Berdasarkan tabel 1 data dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Klaten, Kecamatan Delanggu merupakan kecamatan pengguna kartu tani terbanyak di Kabupaten Klaten. Jumlah pengguna kartu tani di Kecamatan Delanggu mencapai 15.460 orang, atau sekitar 21,9% dari total pengguna kartu tani di Kabupaten Klaten. Pada pelaksanaannya, program kartu tani di Kecamatan Delanggu masih menghadapi permasalahan, yaitu terkait dengan efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi yang dimana terdapat penggunaan pupuk berlebih oleh petani.

Permasalahan ini jelas mempengaruhi efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Efektivitasnya sendiri dapat diukur dari beberapa aspek, salah satunya adalah tingkat kepatuhan petani dalam menggunakan kartu tani (Ramlayana, 2022). Tingkat kepatuhan petani adalah tingkat konsistensi petani dalam menggunakan kartu tani sesuai dengan peraturan yang telah berlaku (Nugroho dan Nurrochmat, 2021).

Beberapa petani tidak patuh dalam menggunakan kartu tani yang menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhannya dan menjual lagi pupuk bersubsidi di pasaran. Efektivitas pupuk bersubsidi dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk prosedur pelaksanaan, manfaat yang diperoleh, dampak terhadap produksi dan pendapatan petani. Pengetahuan petani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi kartu tani. Petani yang memiliki pengetahuan yang tinggi program kartu tani cenderung lebih patuh dalam menggunakan kartu tani, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran (Riyanto & Wulansari, 2022). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas program kartu tani di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan efektivitas program kartu tani di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis tingkat pengetahuan petani dan efektivitas program kartu tani di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
2. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas program kartu tani di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas program kartu tani.
2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada petani mengenai pentingnya pengetahuan dalam memanfaatkan program kartu tani.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas program kartu tani dalam rangka mensejahterakan petani.